

PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, UMUR ADMINISTRATIF DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia pada Tahun 2019)

THE EFFECT OF REGIONAL PROPERTY, ADMINISTRATIVE AGE AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX ON DISCLOSURE OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL INFORMATION THROUGH THE OFFICIAL WEBSITE OF THE REGIONAL GOVERNMENT

(Case Study On Provincial Government in Indonesia in 2019)

Antifa Puspa¹, Sri Rahayu²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

tiffaa@student.telkomuniversity.ac.id¹, srirahayu@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, setiap Badan Publik wajib mencantumkan informasi publik secara berkala, informasi yang dimaksud meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan Badan Publik dan kinerja Badan Publik, Laporan Keuangan dan Informasi lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, umur administratif dan indeks pembangunan manusia terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, umur administratif dan indeks pembangunan manusia terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan Software SPSS Versi 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, umur administratif dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah. sedangkan secara parsial kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Variabel umur administratif dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah.

Kata kunci : Kekayaan Daerah, Umur Administratif, Indeks Pembangunan Manusia, Penungkapan Informasi Keuangan melalui website resmi pemerintah daerah

Abstract

Based on Law No. 14 of 2008 regarding public information, every Public Agency is required to periodically, the information referred to includes information related to Public Agency, Public Agency activities, Financial Reports and others as regulated in the Laws and Regulations. This study aims to examine the effect of regional wealth, administrative age, and human development index on local government financial information through the official local government website.

This study aims to examine the effect of regional wealth, administrative age and human development index on the disclosure of local government financial information through the local government's official website. The data used in this research is secondary data. This study uses quantitative methods. The sampling technique in this study used a saturated sample. The sample in this study is the Provincial Government in Indonesia in 2019. The data analysis model used in this study is multiple regression analysis using SPSS Software Version 23.

The results of the study show that regional wealth, administrative age and human development index simultaneously affect the disclosure of financial information through the local government's official website. while partially regional wealth has a positive effect on the disclosure of financial information through the local government's official website. The administrative age variable and the human development index have no effect on the disclosure of financial information through the official local government website.

Keywords: Regional Wealth, Administrative Age, Human Development Index, disclosure of local government information through the official regional website

1. Pendahuluan

Transparansi merupakan salah satu aspek yang mendasar untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Salah satu wujud pemerintah yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan akses bagi masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintah. Transparansi dapat diukur melalui indikator kesediaan, kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Pemerintah dapat melakukan transparansi dengan cara melakukan mengungkapkan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui *website* pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Pengukuran pada penelitian ini mengacu pada Penelitian yang dilakukan oleh ^[1] yang diukur dengan menggunakan indeks *skoring (checklist)* tingkat pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah dan juga disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

Internet Financial Reporting melalui *e-governance* merupakan salah satu media yang memenuhi aspek *value of money* atau disebut juga 3E (Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomi) untuk mengumumkan dan menyediakan informasi mengenai laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan publik ^[8]. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi milik pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tiga variabel yang dalam penelitian pengaruhnya tidak konsisten yaitu kekayaan daerah, umur administratif dan indeks pembangunan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, umur administratif dan indeks pembangunan manusia terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah.

2. Dasar Teori dan Metode Penelitian

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Signalling Teori

Teori *signalling* dalam konteks sektor publik menjelaskan bahwa pemerintah melakukan usaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat. Dalam teori pensinyalan, pemerintah dikatakan sebagai agen dan masyarakat sebagai principal. Pemerintah merupakan pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola kekayaan yang bersumber dari masyarakat ^[3]. Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan sinyal atau informasi keuangan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah^[3]. Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Pemerintah melalui *website* merupakan salah satu sinyal yang positif kepada masyarakat agar masyarakat dapat terus mendukung jalannya pemerintahan secara optimal ^[1].

2.1.2 Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan melalui *website* resmi Pemerintah Daerah

Kekayaan daerah merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam mengelola sumber daya milik daerahnya serta pendapatan lain yang bersumber dari daerah tersebut ^[4]. Berikut rumus dalam menentukan kekayaan daerah:

$$\text{Kekayaan Daerah} = \text{Ln PAD}$$

Semakin tinggi kekayaan daerah, pengawasan dari masyarakat juga akan semakin ketat karena terdapat kekhawatiran masyarakat akan terjadinya penyelewengan dana yang mungkin terjadi ^[8]. Hal tersebut dapat menjadi motivasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan berupa laporan keuangan dalam *website* resmi pemerintah ^[4]. Semakin tinggi kekayaan daerah maka pemerintah akan semakin termotivasi untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah, sehingga kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ^[11] yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi Pemerintah Daerah.

H1 : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah.

2.1.3 Umur Administratif terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan melalui *website* resmi Pemerintah Daerah

Umur administratif pemerintah daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang pembentukan daerah tersebut. Umur administratif dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Umur Administratif = Tahun Penelitian – Tahun dibentuknya Pemerintah berdasarkan Undang-Undang

Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama akan semakin berpengalaman dalam menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Publik, ini disebabkan karena pemerintah telah menindaklanjuti hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya dan memperbaiki penyajian laporan keuangan pada tahun sebelumnya [2]. Dengan demikian semakin lama umur administratif pemerintah semakin besar tingkat pengungkapan yang harus dilakukan, sehingga umur administratif pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh [1] yang menyatakan bahwa umur administratif memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah.

H2 : Umur administratif berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui website resmi Pemerintah Daerah

2.14 Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan melalui website resmi Pemerintah Daerah

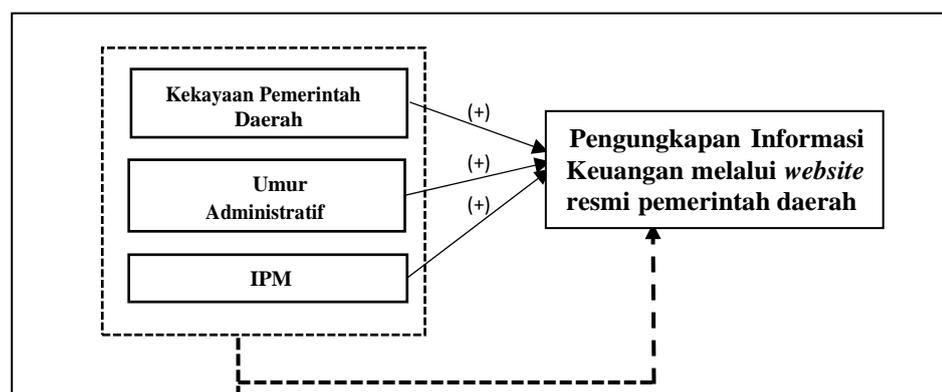
Indeks Pembangunan manusia merupakan tolok ukur yang biasa digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat [9]. Berikut merupakan rumus dalam menentukan indeks pembangunan manusia :

$$\text{IPM} = \text{Skor Indeks Pembangunan Manusia}$$

Indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Semakin tinggi pembangunan manusia, maka semakin beragam keinginan masyarakat yang ingin terpenuhi, yang akhirnya masyarakat akan menuntut pemerintah untuk memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih rinci [10]. Semakin tinggi pembangunan manusia, maka semakin tinggi tuntutan masyarakat untuk pemerintah melakukan pengungkapan terhadap laporan keuangan pemerintah daerahnya, hal tersebut berarti bahwa Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh [9] [10] yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi Pemerintah Daerah.

H3 : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah.

Berlandaskan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data yang telah diolah (2021)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah informasi keuangan pemerintah daerah yang diperoleh melalui situs resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh, dengan sampel yang didapat sebanyak 34 sampel

data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS 23. Berikut model persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah
 α : Konstanta
 X1 : Kekayaan Pemerintah Daerah
 X2 : Umur Administratif
 X3 : Indeks Pembangunan Manusia
 $\beta_1 - \beta_3$: Koefisiensi Regresi
 e : Error

3. Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis sebuah data untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai nilai rata-rata, maksimum, minimum dan standar deviasi. Analisis Deskriptif dalam penelitian ini akan menggambarkan variabel kekayaan daerah (X1), umur administratif (X2), indeks pembangunan manusia (X3), dan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah (Y).

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	34	26,57	31,45	28,4279	1,16737
X2	34	7	69	50,50	19,350
X3	34	60,84	80,76	71,0403	3,91320
Y	34	,08	,84	,4047	,22878
Valid N (listwise)	34				

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS 23

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, Kekayaan Daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,4279 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,16737 itu artinya standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata, sehingga data tersebut tidak bervariasi dan Nilai maksimum dari kekayaan daerah sebesar 31,45 yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan nilai minimum sebesar 26,57 yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat. Umur Administratif memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 50,50 sedangkan standar deviasi sebesar 19,350 itu artinya standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata, sehingga data tersebut tidak bervariasi. Nilai maksimum dari umur administratif sebesar 69 yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan D I Yogyakarta. Sedangkan nilai minimum sebesar 7 dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara. Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 71,0403 sedangkan standar deviasi sebesar 3,91320 itu artinya standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata, sehingga data tersebut tidak homogen. Nilai maksimum dari indeks pembangunan manusia sebesar 80,76 yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan nilai minimum sebesar 60,84 yang dimiliki oleh Provinsi Papua. Pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4047 sedangkan standar deviasi sebesar 0,22878 hal tersebut berarti bahwa standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata, sehingga data tidak bervariasi. Nilai maksimum dari pengungkapan informasi keuangan sebesar 0,84 dan nilai minimum sebesar 0,08 hal tersebut berdasarkan banyaknya informasi yang diungkapkan oleh masing-masing pemerintah melalui *website* resminya.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji *kolmogorov-smirnov* (KS).

Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18846949
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.087
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^a

Sumber: Data SPSS Diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang diteliti berdistribusi normal.

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terdapat korelasi yang terjadi antar variabel dalam data yang diteliti. Data dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai *variance inflation factor* atau $VIF > 10$ dan nilai *Tolerance* $< 0,1$

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1	.523	1,910
	X2	.654	1,528
	X3	.743	1,345

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang telah diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa nilai *variance inflation factor* (VIF) dari ketiga variabel yaitu kekayaan daerah (X1) sebesar 1,910, umur administratif (X2) sebesar 1,528 dan indeks pembangunan manusia (X3) sebesar 1,345. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Kemudian, dapat diketahui nilai *Tolerance* dari ketiga variabel, yaitu kekayaan daerah sebesar 0,523, umur administratif 0,654 dan indeks pembangunan manusia sebesar 0,743, nilai *Tolerance* dari ketiga variabel tersebut lebih besar dari 0,10 sehingga dapat dikatakan ketiga variabel pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

3.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada t-1. Metode *Durbin-Watson* dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi, asumsi terpenuhi apabila nilai DW $> 0,05$. Hasil uji autokorelasi berdasarkan data yang diuji ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.567 ^a	.321	.253	.19767	1,697

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

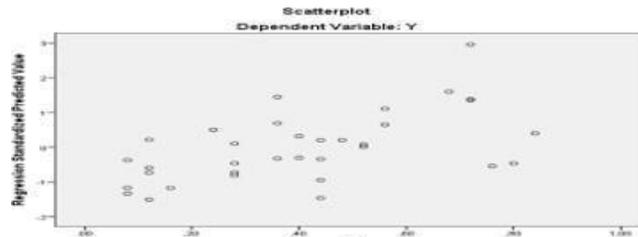
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang telah diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4 diatas diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,697 hal tersebut berarti bahwa data yang telah diuji pada penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.



Gambar 2. Diagram Scatterplot Heteroskedastisitas

Sumber: Data yang telah diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa data yang diuji tidak membentuk suatu pola tertentu atau suatu pola yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit. Data juga tersebar dibawah dan diatas angka 0 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil output SPSS 23 diperoleh nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = -3,126 + 0,106 X_1 - 0,001 X_2 + 0,008 X_3$$

Nilai konstanta yang didapat sebesar $-2,674$ artinya adalah apabila variabel X_1 , X_2 dan X_3 diabaikan atau bernilai 0, maka nilai pengungkapan informasi keuangan akan menjadi sebesar $-3,126$. Nilai kekayaan daerah (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah dengan koefisien regresi sebesar $0,106$. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadinya peningkatan sebesar satu satuan dan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar $0,106$ satuan. Nilai umur administratif pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah dengan koefisien sebesar $-0,001$. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadinya peningkatan umur administratif pemerintah daerah sebesar satu satuan dan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar $-0,001$ satuan. Nilai indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah dengan koefisien sebesar $0,008$. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadinya peningkatan sebesar satu satuan dan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar $0,008$ satuan.

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Koefisiensi Determinasi

Tabel 5. Hasil Pengujian Koefisiensi Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.517 ^a	.267	.194	.20317

Sumber: Data yang telah diolah (2021)

Berdasarkan hasil pengujian koefisiensi determinasi pada tabel diatas diperoleh nilai R^2 sebesar $0,194$ atau $19,4\%$. Hal tersebut berarti bahwa variasi dari pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2019 yang dapat dijelaskan oleh kekayaan daerah, umur administratif dan indeks pembangunan manusia ialah sebesar $19,4\%$, sedangkan sisanya sebesar $80,6\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

3.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 6. Hasil Pengujian Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.555	3	.185	4.735	.008 ^b
	Residual	1.172	30	.039		
	Total	1.727	33			

Sumber: Data yang telah diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis simultan (Uji F) diperoleh nilai

signifikansi sebesar 0,023. Hal tersebut menunjukkan perbandingan signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ hal tersebut berarti bahwa variabel kekayaan daerah, umur administratif, indeks pembangunan manusia secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah.

3.4.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 7. Hasil Pengujian Statistik t

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,128	,997		-3,137	,004
	X1	,108	,041	,541	2,600	,014
	X2	-,001	,002	-,115	-,618	,541
	X3	,002	,010	,142	,811	,424

Sumber: Data yang telah diolah (2021)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $(0,014) < (0,05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa kekayaan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian umur administratif tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $(0,541) > (0,05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut berarti bahwa umur administratif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $(0,424) > (0,05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut berarti bahwa indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Adapun hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengaruh Kekayaan Daerah, Umur Administratif dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan melalui *website* resmi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan pada Tabel 6 diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,025 > 0,05$, hal tersebut berarti bahwa variabel Kekayaan Daerah, Umur Administratif dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui *website* resmi Pemerintah Daerah. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi kekayaan daerah, semakin lama umur administratif pemerintah daerah dan semakin baik indeks pembangunan manusia maka informasi keuangan yang diungkapkan akan semakin banyak sebagai salah satu wujud tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

B. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan melalui *website* resmi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) dalam tabel 4.12 nilai signifikansi kekayaan daerah yang diperoleh sebesar $(0,046) < (0,05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hal tersebut sesuai dengan kerangka pemikiran dimana kekayaan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah, yang berarti semakin tinggi kekayaan daerah yang dimiliki maka akan semakin tinggi pengungkapan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah daerah yang telah memiliki nilai kekayaan daerah yang tinggi dianggap telah mampu dalam mengelola sumber daya dengan baik dan mampu mengarahkan masyarakat untuk taat dalam membayar pajak sehingga mampu menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi. Pendapatan tersebut nantinya akan diakumulasikan dengan pendapatan lain dan dana perimbangan untuk menjalankan roda pemerintahan.

C. Pengaruh Umur Administratif terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan melalui *website* resmi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) dalam tabel 4.12 nilai signifikansi umur administratif yang diperoleh sebesar $0,631 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel umur administratif secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Artinya umur administratif pemerintah daerah tidak dapat dijadikan indikasi bahwa pemerintah daerah yang telah lama berdiri akan melakukan transparansi pengelolannya melalui *website* resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang telah memiliki umur administratif yang cukup lama berarti telah memiliki banyak pengalaman dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan, namun hal tersebut tidak cukup mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam melakukan transparansi

pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pemerintah provinsi yang memiliki umur administratif diatas rata-rata, namun melakukan pengungkapan informasi keuangan dibawah rata-rata. umur administratif pemerintah yang telah lama berdiri harus diimbangi dengan kesadaran pemerintah daerah mengenai pentingnya melakukan pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah guna mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat.

D. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan melalui *website* resmi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) dalam tabel 4.12 nilai signifikansi indeks pembangunan manusia sebesar $0,313 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah. Artinya indeks pembangunan manusia yang tinggi tidak menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia diatas rata-rata berarti telah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan taraf hidup masyarakat pada suatu daerah. namun hal tersebut tidak cukup mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah. hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pemerintah provinsi yang memiliki nilai indeks pembangunan manusia diatas rata-rata, namun melakukan pengungkapan informasi keuangan dibawah rata-rata.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah, umur administratif dan indeks pembangunan manusia terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah pada periode 2019. Sampel dari penelitian ini adalah informasi keuangan dari 34 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara simultan kekayaan daerah, umur administratif dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah.
2. Secara parsial kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Sedangkan umur administratif dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah.

REFERENSI

- [1] Destya, K. (2019). Determinan Praktik Internet Financial Reporting (IFR) Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017).
- [2] Gina, P. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah , Kompleksitas Pemerintahan Daerah , Umur Administratif Pemerintahan Daerah , Ketergantungan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun 2014).
- [3] Ningsih, R. F. (2018). informasi keuangan daerah via website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*.
- [4] Nurhidayati, R. P., & Sri, R. (2020). Determinan Pengungkapan Lkpd Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 87–95.
- [5] Pemerintah, R.I. (2008). *Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [6] Pemerintah, R.I. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [7] Pemerintah, R.I. (2012). *Instruksi Menteri Dalam Negeri No 188.52/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi*. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia
- [8] Prima, W., & Verawaty. (2018). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui E-Government di Sumatera Bagian Selatan. *Seminar Nasional Global Competitive Advantage*, 2(2), 40–51.
- [9] Shafira, U. (2019). pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19 No 2, 253–263.
- [10] Setyowati, L. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Esensi*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3120>
- [11] Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Modus*, 30(1), 54–70.